

KEBIJAKAN PENGHAPUSAN BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (BSNP)

Anisa Nur Rahmawati¹, Farid Setiawan², Danu Aprianto³, Hesty Andriani Tampubolon⁴, Whulan Kinanti Nur Aini⁵, Hizbullah Muhammad Huda⁶
Universitas Ahmad Dahlan
Email: anisa2000031234@webmail.uad.ac.id¹

Abstract

Education is one of the institutions or institutions that educate the nation and state. As a subject, students are expected to be able to become the nation's next generation who are capable and beneficial to society. Educators and educational institutions play an important role in a school's progress. Likewise with curriculum renewal. The curriculum that is always updated triggers several things that affect practitioners and even education experts propose new things, one of which is related to the abolition of the BSNP (National Education Standards Agency) policy to become the Standards, Curriculum and Assessment Agency. Associated with this renewal triggers several aspects of the latest aspects in the world of education. The purpose of this article is to find out the nature of the National Education Standards Agency (BNSP), the foundations in the National Education Standards Agency (BNSP), as well as the assessment standards in BNSP and how reforms are related to the Standards, Curriculum and Assessment Agency. The method used is library research method. The collection technique is manual and digital. After all the references have been collected, the writer tries to describe and analyze the research results according to the themes discussed.

Keywords: Elimination, Policy, BSNP

Abstrak

Pendidikan menjadi salah satu wadah sebagai lembaga atau instansi yang mencerdaskan bangsa dan Negara. Sebagai subjek peserta didik yang diharapkan mampu menjadi generasi penerus bangsa yang mumpuni dan bermanfaat bagi masyarakat. Pendidik dan lembaga pendidikan memegang peranan penting dalam sebuah kemajuan sekolah. Begitu juga dengan pembaharuan kurikulum. Kurikulum yang selalu diperbaharui memicu beberapa hal yang mempengaruhi praktisi bahkan pakar pendidikan mengajukan hal-hal baru, salah satunya terkait dengan penghapusan kebijakan BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) menjadi Badan Standar, Kurikulum dan Assesmen. Terkait dengan pembaharuan ini memicu beberapa aspek aspek terbaru dalam dunia pendidikan. Tujuan disusunnya artikel ini adalah untuk mengetahui hakikat dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP), landasan-landasan dalam Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP), serta standar penilaian dalam BNSP dan bagaimana pembaharuan terkait dengan Badan Standar, Kurikulum dan Assesmen. Metode yang digunakan adalah metode penelitian studi pustaka (library research). Teknik pengumpulannya dengan manual dan digital. Setelah semua referensi terkumpul penulis berupaya menjabarkan dan menganalisis hasil penelitian sesuai dengan tema yang dibahas.

Kata Kunci: Penghapusan, Kebijakan, BSNP

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik sebelum orde baru maupun setelah orde baru. Mulai diberlakukannya beberapa kurikulum yang berganti hampir di setiap tahunnya, penyusunan UU Sistem Pendidikan Nasional, dll. Termasuk membentuk suatu badan independen yang mengemban misi untuk mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi pelaksanaan Standard Nasional Pendidikan yang kemudian dinamakan dengan Badan Standard Nasional Pendidikan atau BSNP.

BSNP sebagai bagian daripada organisasi penyelenggara pendidikan di bawah naungan Kemendikbud memiliki tugas dan kewenangan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, untuk: mengembangkan Standard Nasional Pendidikan, menyelenggarakan Ujian Nasional, memberikan rekomendasi kepada Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan, merumuskan kriteria kelulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah, menilai kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran. (Ridho Pradita, 2018)

Dalam menjalankan tugasnya, BSNP didukung suatu sekretariat yang secara *ex-officio* diketuai pejabat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang telah ditunjuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). BSNP sendiri dapat menunjuk tim-tim ahli yang bersifat *ad hoc* sesuai dengan kebutuhan. Selain didukung, BSNP juga berkoordinasi dengan Kemendikbud serta departemen yang menangani bagian pemerintahan di bidang agama, dan dinas yang menangani pendidikan di provinsi/kabupaten/kota (Ulinuha, 2016)

Namun dewasa ini terdapat polemik tentang BNSP ini, yakni terkait dengan kebijakan penghapusan Badan Standard Nasional Pendidikan. Kebijakan ini pun memantik polemic di tengah masyarakat. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim memberikan penjelasan tentang penghapusan Badan Standard Nasional Pendidikan (BSNP) yang memantik polemik ditengah masyarakat dan rencana penggantinya dengan Dewan Pakar Standard Nasional Pendidikan. bahwasanya penghapusan ini adalah dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan tersebut diantaranya adalah indikator penjaminan mutu yang meliputi independensi organisasi dan partisipasi terhadap publik. Hal ini didukung

dengan evaluasi kinerja BSNP selama ini menurutnya, yang hanya berfokus kepada *output* suatu satuan lembaga pendidikan saja, missal penyelenggaraan UN di sekolah dasar atau menengah, dan kurang optimal dalam melaksanakan standarisasi Sistem (Wulandari, 2020)

Kebijakan penghapusan ini tentu saja menuai pro dan kontra di segala lingkup elemen masyarakat terutama civitas pemerhati dunia Pendidikan. Seperti misalnya Wasekjen PB PGRI, Dudung Abdul Qodir yang mengatakan bahwa kebijakan Nadiem ini terkesan terburu-buru dan dinilai kurang efektif. Jika kita meninjau sepenggal dari kasus ini, tentunya semakin menarik jika dapat kita ketahui bersama agar lebih mendapatkan informasi yang tepat, matang dan akurat. Oleh karenanya dalam makalah ini penulis berikhtiar agar hal tersebut yang lebih meluas dapat teruraikan dengan baik. *Biidznillah.*

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian studi pustaka atau kepustakaan (*library research*). Metode penelitian studi pustaka merupakan metode yang digunakan dalam karya ilmiah sebagai salah satu cara untuk menyusun karya ilmiah tersebut melalui analisis data dari jurnal maupun buku terkait. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik manual dan digital. Sumber atau referensi yang diambil adalah menggunakan jurnal-jurnal dan buku terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Badan Standar Nasional Pendidikan

Bsnp merupakan organisasi mandiri dan independen yang bertugas, mengawasi penerapan, membeberkan, serta menilai standar nasional pendidikan. Dalam menjalankan tugas serta fungsinya bersifat mandiri dan profesional. Dalam pasal 77 bsnp dibantu serta berkoordinasi dengan bagian yang mengurus pemerintahan bagian agama serta instansi yang mengatur pendidikan di provinsi, kabupaten atau kota. Pada pasal 76 PP no 19 tahun 2005 bahwa tugas BSNP menolong anggota kabinet dalam meninjau, meluaskan, serta mengendalikan standar nasional pendidikan. Anggota BSNP telah dijelaskan di pasal 74,

anggota bsnp berjumlah gasal atau 11 orang serta maksimal nya 15 orang. Anggota tersebut terdiri dari penilaian pendidikan, bidang psikometri, administrasi pendidikan yang mempunyai pengetahuan, keahlian, serta kewajiban untuk pengembangan kualitas pendidikan. BSNP ini dilantik serta dilengserkan oleh menteri untuk masa bakti 4 tahun. (Cahyono, 2015)

2. Landasan filosofis dan yuridis standar penilaian

Menetapkan serta menerapkan penilaian standar pendidikan sesuai dengan BSNP wajib mempunyai dasar filosofis dan teoritis yang kebal hukum. Seperti yang dijelaskan terkait pedoman penilaian di atas naskah akademis yang diterbitkan oleh BSNP dijelaskan sebagai berikut :

1. Proses pendidikan merupakan suatu proses penanaman bakat siswa untuk meningkatkan keterampilan serta kemampuan siswa. Tetapi wajib kita sadari hal tersebut tidaklah mudah di akomodasi kan cukup memenuhi keperluan siswa didalam perkembangan belajar. Namun bahwasanya harus kita ketahui didalam perkembangan proses belajar siswa wajib dilakukan secara adil dalam proses pendidikan atau penilaian, oleh karena itu dalam penilaian tidak di lakukan memihak, adil dan tidak memihak objektifitas tinggi. Pernyataan tersebut menyiratkan bawa semua peserta didik diperlakukan harus sama dalam bentuk apapun harus diminimalkan satu sampai lebih formalitas tindakan yang dapat menguntungkan atau tidak sekelompok siswa. Kemudian dalam penilain yang adil itu tidak boleh mendiskrinatif latar belakang budaya, ras, bahasa, gender serta ekonomi seseorang atau komunitas.
2. Tanggung jawab selaku panitia yang menyelenggarakan pendidikan. Maka dijelaskan pada ayat (2) mengevaluasi siswa, institusi serta satuan pendidikan penyelenggaraan formal serta informal pada seluruh tingkatan, bagian serta tingkat pendidikan. Selanjutnya. Dalam pasal 58(1) menjelaskan bahwa menilai proses siswa serta mengevaluasi hasil belajar dapat di lakukan seorang guru agar dapat mengukur proses belajar. Perkembangan serta peningkatan evaluasi belajar siswa berkelanjutan, sedangkan dalam ayat (2) di terangkan lebih dalam mengevaluasi siswa tingkat pendidikan serta rencana pembelajaran teratur, komprehensif, transparan serta sistematis oleh lembaga-lembaga yang mapan memenuhi SNP (standar nasional

pendidikan). Serta peraturan dan pelaksanaan pembelajaran di rumuskan, dalam pasal 63(1) kebijakan negara nomor 19 tahun 2005 mengatur bahwa dalam menilai pendidikan terkhusus dalam menilai perkembangan hasil belajar siswa SD dan SMP meliputi:

1. Penilaian pendidik terhadap pengembangan hasil belajar
2. Penilaian hasil belajar tingkat pendidikan
3. Penilaian pemerintah terhadap evaluasi pembelajaran. (Wulandari, 2020)

3. Standar Penilaian dalam Standar Nasional Pendidikan

Standar penilaian dalam dunia pendidikan ialah salah instrument yang begitu penting dalam pendidikan nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya Permen (Peraturan Pemerintah) No. 19 Tahun 2005 terkait dengan Standar Pendidikan Nasional yang mana merupakan salah satu ciri-ciri minimal tentang sistem pendidikan nasional. Maka dari itu standar nasional dalam dunia pendidikan memiliki fungsi dan peranan. Salah satu peranan standar nasional pendidikan ini adalah sebagai rencana atau dasar, pengawasan dan pelaksanaan dalam pendidikan dalam upaya mencapai dan mewujudkan pendidikan nasional yang berkemajuan sehingga menciptakan pendidikan yang bermutu. (Wachidia, 2019)

Standar penilaian dalam dunia pendidikan adalah patokan bagi pendidikan atau guru-guru dalam melakukan terhadap peserta didik yang tersistematis, adil, objektif dan juga edukatif. Ada beberapa bentuk penilaian bagi peserta didik yang biasanya diterapkan dalam penilaian oleh pendidik. Penilaian formatif dilakukan dengan memantau peserta didik, memperbaiki proses pembelajaran, serta melakukan evaluasi terkait dengan tujuan dari pembelajaran. Sedangkan penilaian sumatif dilakukan dengan bagaimana menilai pencapaian hasil belajar yang dijadikan patokan sarana penentuan dalam ujian kenaikan kelas ataupun nilai keseharian yang menentukan kenaikan kelas sesuai dengan standar kemampuan lulusan yang telah diterapkan. (Handayani, 2016)

Dari standar penilaian dalam pendidikan tersebut, terdapat jenis-jenis standar penilaian dalam pendidikan di Indonesia. Antara lain, sebagai berikut:

1. Standar isi

Standar isi merupakan kemampuan minimal yang ada dalam diri peserta didik serta dimiliki dalam jiwa yang melekat dalam diri peserta didik dalam sebuah jenjang

pendidikan seperti halnya sebuah kerangka struktur ataupun dasar kurikulum, kalender belajar dan kaldik (kalender akademik).

2. Standar Proses

Standar proses memiliki kaitan dengan bagaimana proses dalam pembelajaran yang berjalan di sebuah kelas pada masing-masing yang ada dalam jenjang lembaga pendidikan atau instansi.

3. Standar Kompetensi Lulusan

Standar kompetensi lulusan ialah salah satu kriteria dari kemampuan lulusan dalam sebuah instansi atau lembaga pendidikan, hal ini mencakup terkait dengan afektif (sikap), kognitif (pengetahuan) dan psikomotor (keterampilan).

4. Standar Pendidikan dan tenaga pendidikan

Terkait dengan standar pendidikan dan tenaga pendidikan, tentunya dalam sebuah sekolah yang menjadi tenaga pendidik yakni guru memiliki peranan penting yaitu mengajar, mendidik, membimbing dan memberi penilaian terhadap peserta didik. Selain itu juga memiliki keterlibatan terkait dengan administrasi dalam sebuah instansi atau lembaga pendidikan yakni seperti halnya dengan kepala sekolah, tata usaha dan administrasi serta pengawas sekolah dan lainnya.

5. Standar sarana dan prasarana

Dalam standar sarana dan prasarana yang dijadikan sebagai patokan dalam proses pembelajaran yang terus berkelanjutan mencakup beberapa hal yaitu peralatan dan kebutuhan yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan.

6. Standar pengelolaan

Standar pengelolaan diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 19 Tahun 2007 bahwa satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan dalam pendidikan yang sudah menjadi ketentuan dan berlaku secara nasional. Pengelolaan tersebut terdapat tiga bagian yaitu standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, standar pengelolaan oleh pemerintah dan standar pengelolaan oleh pemerintah daerah.

7. Standar pembiayaan

Dalam standar pembiayaan ini, terkait dengan pembiayaan yang berlanjut terus menerus akan menjadi salah satu faktor pemenuhan kebutuhan sekolah dan pendidikan lainnya.

8. Standar penilaian pendidikan

Standar penilaian pendidikan memiliki fungsi yang dijadikan sebagai tolak ukur sejauh mana pencapaian hasil belajar peserta didik. (Metaputun, 2020)

4. Penghapusan BNSP Menjadi Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen

Terkait dengan badan standard, kurikulum dan assessment tentu hal ini berbeda dengan Badan Standar Nasional Pendidikan. Badan Standar Nasional Pendidikan yang awalnya memuat beberapa aspek antara lain sebagai berikut: aspek standar pendidik atau guru, aspek standar isi, aspek standard pengelolaan, aspek standar pembiayaan, aspek standard lulusan dan kompetensi yang dimiliki, aspek standar sarana dan prasarana dan aspek standar pembiayaan. Sedangkan beberapa aspek yang berkaitan dengan kurikulum diantaranya adalah aspek pembelajaran, aspek materi yang diajarkan, aspek tujuan dan yang terakhir ialah aspek pendidikan. Kurikulum, standard dan juga assesmen tentunya memiliki peranan dan fungsinya masing-masing, peranan dan fungsi masing-masing tersebut memiliki kaitan satu sama lain. (Nasyirwan, 2015)

Standard pendidikan adalah patokan dari minimal nilai yang dijadikan pijakan dalam proses pendidikan. Standar pendidikan ini memiliki posisi dan menjadi pusat dan sangat signifikan. Sedangkan kurikulum, memiliki kaitan yang tertuju pada proses kegiatan pembelajaran yang berlangsung, dimulai dari tujuan yang direncanakan, proses yang dijalankan, dan bagian akhir memuat evaluasi setelah berjalannya tujuan dan proses. Selain itu, assesmen merupakan sebuah kegiatan dalam penilaian yang menjadikan acuan atau patokan dalam sebuah perbaikan dalam pembelajaran di sebuah lembaga atau instansi sekolah. Dari hal ini, Badan Standar, Kurikulum dan Assesmen sebagai pembaruan dari Badan Standar Nasional Pendidikan atau BNSP posisinya adalah sebagai penyelenggara dan menyusun standar, kurikulum dan assesmen dalam proses pengelolaan dalam system perbukuan.

Beberapa aspek yang menjadi dasar dalam standar, kurikulum dan assesmen ini sebagai pembaharuan dari Badan Standar Nasional Pendidikan, memiliki memiliki beberapa aspek antara lain adalah;

1. Menyusun Kebijakan dalam bidang standar pendidikan

Tugas dan wewenang yang selama ini berada ditangan BNSP kini beralih peran kepada pembaharuannya yakni Badan Standar, Kurikulum dan Assesmen Pendidikan.

2. Menyusun kebijakan teknis dibidang kurikulum dan assesmen pendidikan dan mengelola dalam system penyusunan perbukuan.

Memiliki peranan penting dalam pengevaluasian, pengembangan kurikulum yang tentunya berdasarkan kepada keperluan sekolah dan masyarakat dan juga melaksanakan sebuah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dalam lembaga atau instansi pendidikan. Salah satunya adalah sebagai awalan dalam pelaksanaan Asesmen Nasional melalui AKM (Asesmen Kompetensi Minimal), Survey Lingkungan Belajar dan Asesmen Kompetensi Minimal yang pada umumnya menjadi kebijakan masyarakat dan pemerintah.

3. Melaksanakan sebuah pengembangan, pembinaan dan juga pengawasan dalam system penyusunan perbukuan.

Dalam hal ini badan standar memiliki peranan penting sebagai pengembangan dalam pembelajaran dan juga bahan ajar, terkait dengan referensi apa saja yang diajarkan sebagai referensi dalam belajar mengajar seperti halnya mengembangkan kemampuan literasi. Pada bagian aspek ini, diharapkan terciptanya bahan ajar atau bacaan-bacaan yang lebih luas. Selain itu juga mudah diakses bagi semua peserta didik atau yang membutuhkan bahan ajar baik secara offline maupun online.

Dari beberapa pembaharuan tersebut diharapkannya terwujud tercipta tujuan pendidikan yang lebih baik diantara pertama, adanya badan standar atau lembaga, Kurikulum dan Assesmen Pendidikan bisa menjadi sebuah peningkatan dalam kualitas pendidikan di Negara ini. Kedua, pengembangan Standar Nasional Pendidikan yang menjadi pembaharuan dari BNSP harus tetap dikembangkan dan dilanjutkan dan tentunya sudah bisa menjadi skala prioritas dibandingkan dengan program yang lain dan tentunya tetap memperhatikan kerjasama dan hubungan aspirasi dari masyarakat, praktisi dalam pendidikan, pakar dalam pendidikan, ormas-ormas yang memiliki pengaruh dalam dunia pendidikan dan tentunya menjadi upaya dalam kemajuan pendidikan yang lebih baik kedepannya demi kemajuan bangsa dan Negara. (Prasetyo, 2021)

KESIMPULAN

Penghapusan Badan Standar Nasional Pendidikan menjadi Badan Standar, Kurikulum dan Assesment pada dasarnya tidak dihapuskan sepenuhnya, namun diubah atau dilakukannya pembaruan-pembaruan dalam beberapa aspek-aspek yang berbeda. Dari hal tersebut, memuat beberapa tujuan yang terbaru sebagai upaya-upaya dalam memajukan pendidikan, beberapa diantara aspek tersebut antara lain adalah sebagai berikut;

1. Menyusun Kebijakan dalam bidang standar pendidikan

Tugas dan wewenang yang selama ini berada ditangan BNSP kini beralih peran kepada pembaharuannya yakni Badan Standar, Kurikulum dan Assesmen Pendidikan.

2. Menyusun kebijakan teknis dibidang kurikulum dan assesmen pendidikan dan mengelola dalam system penyusunan perbukuan.

Memiliki peranan penting dalam pengevaluasian, pengembangan kurikulum yang tentunya berdasarkan kepada keperluan sekolah dan masyarakat dan juga melaksanakan sebuah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan dalam lembaga atau instansi pendidikan.

3. Melaksanakan sebuah pengembangan, pembinaan dan juga pengawasan dalam system penyusunan perbukuan.

Pada bagian aspek ini, diharapkan terciptanya bahan ajar atau bacaan-bacaan yang lebih luas. Selain itu juga mudah diakses bagi semua peserta didik atau yang membutuhkan bahan ajar baik secara offline maupun online.

DAFTAR PUSTAKA

Alawiyah, F. (2017). Standar nasional pendidikan dasar dan menengah. *Aspirasi*, 8(1), 81–92. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/1256>

Cahyono, L. E., Wibowo, S. B., & Murwani, J. (2015). Analisis Penerapan 8 Standar Nasional Pendidikan Pada Smp Negeri 2 Dolopo Kabupaten Madiun. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 4(2), 161. <https://doi.org/10.25273/jap.v4i2.684>

Handayani, M. (2016). Akreditasi Sma Di Provinsi Dki Jakarta Achievement of Educational National Standards Based on. *Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan Dan*

Kebudayaan, Balitbang Kemdikbud, 1, 179–202.

Mataputun, Y. (2020). Analisis pemenuhan standar nasional pendidikan dan permasalahannya. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 8(3), 224. <https://doi.org/10.29210/148800>

Nasyirwan. (2015). Pencapaian 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan Oleh Kepala Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Lulusan. *Manajer Pendidikan*, 9(6), 725–726.

Prasetyo, O., & Pratomo, A. R. (2021). Evaluasi Penghapusan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(6), 4102–4107. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i6.1281>

Ridho Pradita, M., & Lubis, F. (2018). Kelayakan Isi Dan Bahasa Buku Ajar Bahasa Indonesia Sekolah Menengah Pertama Kelas Viii Kurikulum 2013 Edisi Revisi 2017 Penerbit Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. *Basastra*, 7(4), 281–294. <https://doi.org/10.24114/bss.v7i4.11739>

Ulinuha, K., & Widodo, J. (2016). Analisis Kelayakan Isi Buku Teks Mata Pelajaran Ekonomi Sma Kelas X Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Ktsp) Di Kabupaten Semarang. *Economic Education Analysis Journal*, 5(1), 206–218.

Wachidia, E. S. M. K. dan. (2019). Strategi Kepala Sekolah Dalam Mengimplementasikan Standar Nasional Pendidikan. *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan*, 4(1), 33. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/JMKSP/article/view/2472>

Wulandari, D. S., Priyatno, B. A., & Maridi, M. (2020). Kajian Standar Nasional Pendidikan Sma Batik 1 Surakarta. *INKUIRI: Jurnal Pendidikan IPA*, 9(1), 82. <https://doi.org/10.20961/inkuiri.v9i1.41559>